

**DATA DAN INFORMASI
KETENAGAKERJAAN
(SATUDATA KEMENAKER RI)
TAHUN 2021**



**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Penyusunan buku data dan informasi ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten paser merupakan wujud dari pengembangan sistem media informasi ketenagakerjaan. Buku data statistik merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang cukup komprehensif. Profil kesehatan indonesia disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator ketenagakerjaan yang bersumber dari unit teknis di lingkungan kementerian ketenagakerjaan serta institusi lain terkait seperti badan pusat statistik (bps).

Dalam buku data dan informasi ketenagakerjaan ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan kabupaten paser, yakni data pelatihan dan produktivitas kerja, data penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dan data hubungan industrial. Dengan penyusunan buku data dan informasi ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten paser diharapkan dapat membantu memberikan informasi data yang akurat, tepat waktu serta dapat dipertanggung jawabkan demi peningkatan kualitas informasi ketenagakerjaan di kabupaten paser.

Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan ketenagakerjaan. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Tana Paser, 30 Desember 2021

Kepala Dinas

Ir.Madju P.Simangunsong

Nip. 19640731 199003 1 007

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB	I PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	1
	C. Dasar Hukum	1
	D. Ruang Lingkup	2
BAB	II KONSEP DAN DEFINISI KETENAGAKERJAAN	
	A. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan	3
BAB	III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN	
	A. Kelembagaan	7
	B. Kegiatan Pengelolaan	8
	1. Pengumpulan Data	8
	2. Pengolahan Data	8
	3. Analisis Data	8
	4. Penyajian Data	9
	5. Publikasi Data	10
	6. Domunetasi/Penyimpanan Data	10
BAB	IV DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	
	A. Data dan Informasi Ketenagakerjaan	11
	1. Lembaga Pelatihan Kerja	11
	2. Instruktur	11
	3. Tenaga Pelatihan	13
	4. Jenis Program dan Peserta Pelatihan Kerja	14
	5. Pemagangan	15
BAB	V DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	
	A. Data dan Informasi Ketenagakerjaan	17
	1. Pencari Kerja (Pencaker)	17
	2. Lowongan Kerja Terdaftar	18
	3. Penempatan Kerja Terdaftar	20
	4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	22

BAB	VI	DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	A.	Data dan Informasi Ketenagakerjaan	25
	1.	Sarana Hubungan Industrial	25
	1.1.	Organisasi Pekerja/Buruh	25
	1.2.	Organisasi Pengusaha	26
	1.3.	Lks Biparit dan Lks Tripartit	26
	1.4.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27
	2.	Permasalahan Hubungan Industrial	28
	2.1.	Perselisihan Hubungan Industrial	28
	2.2.	Unjuk Rasa/Mogok	30
	2.3.	Pemutusan Hubungan Kerja	30
	3.	Pengupahan	31
	4.	Fasilitasi dan Koperasi Pekerja/Buruh	31
	5.	Pengawai Teknis Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial	34
	6.	Hubungan Kerja	35
	6.1.	Perusahaan dengan Pekerja/Buruh Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	35
	6.2.	Perusahaan dengan Pekerja/ Buruh Bersatatus Outsourcing/Alih Daya	36
	6.3.	Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja	37
BAB	VII	PENUTUP	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 alinea F dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggara negara berkewajiban menyediakan data dan informasi yang benar, akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk lingkup Nasional dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan untuk lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota. Saat ini pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menghadapi berbagai kendala sebagai dampak dari pelaksanaan PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kendala yang dihadapi antara lain perubahan struktur organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, perubahan pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dengan berbagai latar belakang pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan. Salah satu upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui pelaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Buku Data dan Informasi Ketenagakerjaan ini adalah merangkum, menyusun dan menganalisa Data dan Informasi Ketenagakerjaan dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, sehingga khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat menggunakannya sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan umumnya stakeholder dapat melihat, menganalisa dan menggunakan data–data statistik yang tersedia dalam buku ini.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten paser, adalah sebagai berikut;

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pengolongan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.250/Men/XII/2008 Tentang Klasifikasi Dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan,
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.11/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan,
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan,
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Buku Data dan Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser ini meliputi :

- a. Kegiatan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan,
- b. Penyajian data dan informasi ketenagakerjaan.

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI KETENAGAKERJAAN

A. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

1. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
2. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
4. Penduduk Usia Kerja, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih atau disebut juga tenaga kerja.
5. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang aktif mencari pekerjaan.
6. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya.
7. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Penganggur terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.
11. Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
12. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
13. Pekerja Paruh Waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima

pekerjaan lain.

14. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*Labour Supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah yang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional.
16. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Antara TPT dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil.
17. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan / usaha / perusahaan / kantor tempat seseorang bekerja.
18. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
20. Produktivitas adalah rasio antara hasil atau luaran (*output*) dengan masukan yang dipakai (*input*).
21. Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.
22. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS, adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
23. Pemagangan adalah golongan dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan, dalam rangka

menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

24. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan kepada pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.
25. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
26. Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
27. Bursa Kerja Khusus adalah pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan pelatihan. Pelayanan dilakukan bagi para lulusan, para siswa yang putus sekolah dan siswa masih aktif.
28. Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
29. Lowongan kerja adalah jenis pekerjaan/jabatan yang belum terisi oleh pencari kerja.
30. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri atas unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Perusahaan adalah
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta, maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
32. Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
33. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
34. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
35. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas,

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

36. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
37. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
38. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

A. Kelembagaan

Urusan ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah, termasuk pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, hal ini termaksud dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa "Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan". Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan "Instansi dalam pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan".

Tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan diatur dalam Permenakertrans No. 1 tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.250/Men/XII/2008 Tentang Klasifikasi Dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan pada Pasal 91 dan 94 dinyatakan bahwa :

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan melalui Sekretaris Dinas bertugas dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota. Hasil pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan dimaksud dilaporkan pada Dinas Provinsi dengan tembusan Pusdatinaker pada minggu pertama setiap bulannya.
2. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan melalui Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang program, evaluasi dan pelaporan bertugas dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota provinsi.
3. Hasil pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan oleh Dinas Provinsi disampaikan pada Kepala Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan pada minggu kedua setiap bulannya, dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal:
 - a. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
 - b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

B. Kegiatan Pengelolaan

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan meliputi : kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan. Penjelasan dari kegiatan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, adalah :

1. Pengumpulan Data

Data ketenagakerjaan umum diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 4 kali setahun dan di publikasikan dalam 2 periode yaitu Februari dan Agustus. Pengumpulan data pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jamsostek dilakukan dengan cara pencatatan administrasi yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

2. Pengolahan Data

Data mentah (*raw data*) Sakernas yang diperoleh dari BPS selanjutnya diolah dengan menggunakan program aplikasi SPSS oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan, hasilnya disajikan dalam bentuk tabel pada website <http://satudata.kemnaker.go.id> dan buku cetakan.

Data yang telah dikumpulkan dari sumber data selanjutnya dientri dan ditabulasikan sesuai dengan keperluan analisis. Pengolahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara manual (dilakukan melalui validasi, identifikasi, klasifikasi, kodefikasi, entri, tabulasi, editing, dan/atau penghitungan) dan cara elektronik (menggunakan program aplikasi sesuai kebutuhan seperti SPSS, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan lainnya).

3. Analisis Data

Analisis data dan informasi ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi ketenagakerjaan dengan berbagai karakteristiknya seperti golongan umur, jenis kelamin, pendidikan, lapangan usaha, jenis pekerjaan/jabatan, status pekerjaan dan lain-lain. Beberapa contoh analisis ketenagakerjaan yang biasa digunakan dalam ketenagakerjaan :

- a. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK); dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Angkatan Kerja (AK) dengan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK).
- b. Analisis Tingkat Ketidaktifan Angkatan Kerja (TKAK); dilakukan dengan cara membandingkan jumlah Bukan Angkatan Kerja (BAK) dengan Penduduk Usia Kerja (PUK).
- c. Analisis Tingkat Penganggur Terbuka (TPT); dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Penganggur Terbuka (PT) dengan jumlah AK pada waktu tertentu.
- d. Analisis Tingkat Kesempatan Kerja (TKK); dilakukan dengan cara membandingkan Penduduk Yang Bekerja (PYB) dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

4. Penyajian Data

Penyajian data dan informasi ketenagakerjaan disajikan dalam bentuk antara lain :

- a. Tabel;
Disajikan dalam bentuk angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu yang meliputi komponen nomor tabel, judul tabel, format baris dan kolom, serta sumber data. Tabel terdiri dari dua jenis yaitu tabel tunggal (hanya memiliki satu variabel), tabel silang (terdiri atas dua variabel atau lebih).
- b. Grafik;
Disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang menunjukkan data berupa angka yang dibuat berdasarkan tabel dan/atau dalam bentuk visualisasi yang meliputi komponen nomor grafik, judul grafik, grafik, dan sumber data. Jenis-jenis grafik meliputi grafik garis (untuk menunjukkan kecenderungan dalam perubahan kurun waktu atau hubungan antar dua variabel); grafik batang/balok (untuk menggambarkan angka dalam bentuk tinggi, atau panjang dari balok segi empat); grafik lingkaran (untuk menggambarkan klasifikasi atau karakteristik data); dan grafik pictogram (untuk menggambarkan data simbol sebagai ganti dari kata atau angka).
- c. Peta;
Digunakan untuk menggambarkan sebaran dan keadaan ketenagakerjaan berdasarkan klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi ketenagakerjaan berbasis wilayah yang meliputi komponen judul peta, nomor peta, isi peta, skala dan orientasi peta, legenda peta, inzet dan indeks peta, sistem koordinat, serta sumber/keterangan riwayat peta.

d. Narasi;

Digunakan untuk menguraikan peristiwa atau kejadian di bidang ketenagakerjaan pada waktu tertentu meliputi golongan awal, tengah, dan akhir. Jenis-jenis narasi diantaranya narasi ekspositoris (digunakan untuk menguraikan rangkaian kejadian ketenagakerjaan yang disampaikan secara informatif), dan narasi sugestif (digunakan untuk menguraikan rangkaian kejadian atau peristiwa ketenagakerjaan yang disusun sedemikian rupa untuk memotivasi pembaca tentang peristiwa tersebut).

5. Publikasi Data

Data dan Informasi ketenagakerjaan dipublikasikan atau disebarluaskan kepada publik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan melalui dua cara yaitu :

- a. Media cetak yaitu antara lain meliputi *leaflet*, *booklet*, jurnal, dan/atau buku.
- b. Media elektronik yaitu antara lain meliputi *website*, *video*, *audio* dan/atau media sosial internet.

6. Dokumentasi/ Penyimpanan Data

Data dan informasi ketenagakerjaan yang didokumentasikan, merupakan hasil kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyajian, publikasi serta pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan. Dokumentasi data tersebut dilakukan dengan cara manual dan elektronik.

BAB IV

DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

A. Data dan Informasi Ketenagakerjaan

Data dan informasi pelatihan dan produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser adalah :

1. Lembaga Pelatihan Kerja

Data dan informasi lembaga pelatihan kerja menurut penyelenggara di Kabupaten Paser pada tahun 2021 terdiri dari atas 2 (dua) dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Lembaga Pelatihan Kerja Menurut Penyelenggara
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Penyelenggara	Jumlah
1	Pemerintah	1
2	Swasta	5
	Jumlah	6

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Paser sebanyak 6 (lima) yang terdiri dari 1 (satu) lembaga pelatihan kerja yang penyelenggaranya oleh pemerintah dan 5 (Lima) lembaga pelatihan kerja yang penyelenggaranya oleh swasta. Lembaga pelatihan kerja tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah
 1. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Swasta dan Perusahaan
 1. LPKS Acces Com
 2. LPKS Trioufa
 3. LPKS Daya Optima
 4. Prime Of Technology and English
 5. LPK PT.SIMS

2. Instruktur

Data dan informasi instruktur latihan kerja menurut pendidikan, umur, jenjang jabatan, kejuruan, penyelenggara dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. sampai dengan 2.4.

Tabel 2.1
Instruktur Latihan Kerja
Menurut Pendidikan, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Penyelenggara						Jumlah		
		Pemerintah			Swasta			L	P	Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	SMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Diploma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	S1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	S2 / S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Tabel 2.2
Instruktur Latihan Kerja
Menurut Golongan Umur, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Umur	Penyelenggara						Jumlah		
		Pemerintah			Swasta			L	P	Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	20-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	35-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	50-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	58+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Tabel 2.3
Instruktur Latihan Kerja
Menurut Jenjang Jabatan, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Jabatan	Penyelenggara		
		Pemerintah		
		L	P	Jumlah
1	Instruktur Tingkat Terampil	0	0	0
2	Pelaksana	0	0	0
3	Pelaksana Lanjutan	0	0	0
4	Penyelia	0	0	0
5	Instruktur Tingkat Ahli	0	0	0
6	Tingkat Pertama	0	0	0
7	Tingkat Muda	0	0	0
8	Tingkat Madya	0	0	0
TOTAL		0	0	0

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Tabel 2.4
Instruktur Latihan Kerja
Menurut Kejuruan, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Kejuruan	Penyelenggara						Jumlah		
		Pemerintah			Swasta			L	P	Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	Kejuruan Teknik Manufaktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kejuruan Teknik Las	16	0	16	0	0	0	0	0	0
3	Kejuruan Teknik Otomotif	31	1	32	0	0	0	0	0	0
4	Kejuruan Teknik Listrik	16	0	16	0	0	0	0	0	0
5	Kejuruan Teknik Elektronika	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejuruan Refrigeration	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejuruan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kejuruan Bisnis dan Managemen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kejuruan Garmen Apparel	0	32	32	0	0	0	0	0	0
11	Kejuruan Tata Kecantikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejuruan Tata Busana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejuruan Pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kejuruan Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kejuruan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kejuruan Processing	0	16	16	0	0	0	0	0	0
17	Kejuruan Agribisnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kejuruan Desain Batik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kejuruan Pengelolahan Kulit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kejuruan Industri Kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kejuruan Produktivitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kejuruan Pengembangan Sosial Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kejuruan Metodologi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		63	49	112	0	0	0	0	0	0

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah instruktur latihan kerja menurut pendidikan, umur, jenjang jabatan, kejuruan, penyelenggara dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sampai saat ini belum memiliki jabatan fungsional instruktur latihan kerja baik pemerintah maupun swasta.

3. Tenaga Pelatihan

Data dan informasi pelatihan kerja menurut pendidikan, umur, penyelenggara dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1. dan tabel 3.2.

Tabel 3.1
Tenaga Pelatihan
Menurut Pendidikan, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Penyelenggara						Jumlah		
		Pemerintah			Swasta			L	P	Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	SMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Diploma	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3	S1	5	0	5	0	0	0	5	0	5
4	S2 / S3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
JUMLAH		6	1	7	0	0	0	6	1	7

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Tabel 3.2
Tenaga Pelatihan
Menurut Golongan Umur, Penyelenggara dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Umur	Penyelenggara						Jumlah		
		Pemerintah			Swasta			L	P	Jumlah
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah			
1	20-34	2	0	2	0	0	0	2	0	2
2	35-49	4	1	5	0	0	0	4	1	5
3	50-57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	58+	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		6	1	7	0	0	0	6	1	7

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah tenaga pelatihan menurut pendidikan, umur, penyelenggara dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 di Kabupaten Paser sampai saat ini belum terdata di karenakan lembaga pelatihan kerja swasta tidak melampirkan data tenaga pelatihan secara lengkap dan akurat.

4. Jenis Program dan Peserta Pelatihan Kerja

Data dan informasi jenis program dan peserta pelatihan kerja terdiri atas 3 (tiga) sub golongan meliputi target, peserta dan penempatan lulusan. Adapun target, peserta dan penempatan lulusan lembaga pelatihan kerja pemerintah menurut jenis program dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target, Peserta dan Penempatan Lulusan Lembaga Pelatihan Kerja
Pemerintah Menurut Jenis Program dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Program	Target	Peserta			Pencapaian (%)
			L	P	Jumlah	
1	Pelatihan Berbasis Kompetensi	96	63	49	112	100
2	Pelatihan Produktivitas	0	0	0	0	0
3	Permagangan Dalam Negeri	0	0	0	0	0
4	Pelatihan Instruktur	0	0	0	0	0
5	Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan	0	0	0	0	0
6	Pelatihan di LPKS ()	0	0	0	0	0
7	Lainnya	0	0	0	0	0
8	Pelatihan di SKPD Lainnya : ()	0	0	0	0	0
9	Pelatihan di K/L Lainnya	0	0	0	0	0
JUMLAH		96	63	49	112	100

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa pencapaian target, peserta dan penempatan lulusan lembaga pelatihan kerja pemerintah menurut jenis program dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebesar 100 %. Program pelatihan yang mencapai target dan memiliki pencapaian 100%, yakni pelatihan berbasis kompetensi dengan target 112 orang jumlah peserta laki – laki 63 orang dan perempuan 49 orang. Seluruh kegiatan pelatihan ini dana bersumber dari APBN dan APBD tahun anggaran 2021.

5. Pemagangan

Data dan informasi pemagangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) sub golongan meliputi pemagangan kerja di dalam negeri. Adapun jumlah peserta pemagangan kerja di dalam negeri menurut perusahaan dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Peserta Pemagangan Kerja di Dalam Negeri
Menurut Perusahaan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Jenis Kelamin		Jumlah	SUMBER PENDANAAN (APBN, APBD, MANDIRI)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Access Persada Computer	0	2	2	APBN
2	PT. Astra International	0	3	3	APBN
3	Klinik Zahra Medika	1	1	2	APBN
4	PT.Cotrans Asia	0	1	1	APBN
5	Koperasi Prima Sylva	1	1	2	APBN
JUMLAH		2	8	10	

Sumber data dari bidang pelatihan, UPTD BLK dan asosiasi lembaga pelatihan kerja swasta

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah peserta pemagangan kerja di dalam negeri menurut perusahaan dan jenis kelamin di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebanyak 10 orang peserta yang tersebar pada 5 (Lima) perusahaan yang ada di Kabupaten Paser.

BAB V

DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

A. Data dan Informasi Ketenagakerjaan

1. Pencari Kerja (Pencaker)

Data dan informasi pencari kerja (pencaker) menurut pendidikan dan kelompok umur di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	<= SD	11	1	12
2	SMP / SLTP	56	6	62
3	SMA / SLTA	1.369	264	1.633
4	Diploma I	0	0	0
5	Diploma II	7	0	7
6	Diploma III/ Akta III/ Akademi	49	30	79
7	Sarjana (S-1)	173	198	371
8	Pasca Sarjana (S-2)	1	2	3
JUMLAH		1.666	501	2.167

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 1.2
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Umur
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	UMUR	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	15 – 19	419	140	559
2	20 – 29	1.061	350	1.411
3	30 – 44	180	11	191
4	45 – 54	6	0	6
5	55	0	0	0
JUMLAH		1.666	501	2.167

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah pencari kerja (pencaker) menurut pendidikan dan kelompok umur di Kabupaten Paser pada tahun 2021 sebanyak 2.167 orang terdiri dari 1.666 orang laki – laki dan 501 orang perempuan. Pencari kerja (pencaker) di Kabupaten Paser tahun 2021 di dominasi oleh tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 1.633 orang serta dengan kelompok umur 20 – 29 tahun sebanyak 1.411 orang.

2. Lowongan Kerja Terdaftar

Data dan informasi lowongan kerja terdaftar dibagi menurut pendidikan, jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha. Lowongan kerja terdaftar menurut pendidikan, jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.3.

Tabel 2.1
Lowongan Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	<= SD	282	0	282
2	SMP / SLTP	34	2	36
3	SMA / SLTA	391	47	438
4	Diploma I	0	0	0
5	Diploma II	1	0	1
6	Diploma III/ Akta III/ Akademi	27	7	34
7	Sarjana (S-1)	93	11	104
8	Pasca Sarjana (S-2)	1	0	1
JUMLAH		829	67	896

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 2.2
Lowongan Kerja Terdaftar Menurut Jenis Golongan Pokok Jabatan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Jenis Gol. Pokok Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Anggota Angkatan Bersenjata (Kecuali Kepolisian)	0	0	0
2	Anggota Badan Legislatif, Pejabat Tinggi Pemerintah	0	0	0
3	Tenaga Profesional	11	5	16
4	Teknisi dan Kelompok Jabatan yang Sejenis	23	3	26
5	Penata Usaha	58	38	96
6	Tenaga Usaha Jasa dan Penjual Dagangan di Toko dan Pasar	31	13	44
7	Pekerja-pekerja Keterampilan Bidang Pertanian dan Perikanan	457	0	457
8	Pekerja Kasar Terampil dan Sejenisnya	13	0	13

9	Operator dan Perakit mesin dan Mesin Pabrik	101	2	103
10	Pekerja Kasar	117	6	123
JUMLAH		829	67	896

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 2.3
Lowongan Kerja Terdaftar Menurut Sektor Lapangan Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	535	2	546
2	Pertambangan dan Penggalian	160	16	178
3	Industri Pengolahan	1	0	1
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	0	0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan, dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0	0	0
6	Konstruksi	0	0	0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	30	18	52
8	Transportasi dan Pergudangan	5	2	7
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	0	0
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21	10	31
12	Real Estat	0	0	0
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0	0	0
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	74	11	85
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0
16	Jasa Pendidikan	0	0	0
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	7	9
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0	0	0
19	Kegiatan Jasa Lainnya	1	1	2
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	0	0	0
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0
JUMLAH		829	67	896

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah lowongan kerja terdaftar di Kabupaten Paser pada tahun 2021 baik menurut pendidikan, jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha sebanyak 896 orang dengan rincian jumlah laki – laki sebanyak 829 orang dan jumlah perempuan sebanyak 67 orang.

Pada lowongan kerja terdaftar menurut pendidikan didominasi dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 438 orang yang terdiri dari 391 orang laki – laki dan 47 orang perempuan, menurut jenis golongan pokok jabatan didominasi oleh Pekerja-pekerja Keterampilan Bidang Pertanian dan Perikanan sebanyak 457 orang laki – laki dan menurut sektor lapangan usaha didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebanyak 546 orang yang terdiri dari 535 orang laki – laki dan 2 orang perempuan.

3. Penempatan Kerja Terdaftar

Data dan informasi penempatan kerja terdaftar dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi menurut kelompok umur, pendidikan, jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha.

Adapun data dan informasi penempatan kerja terdaftar menurut kelompok umur, pendidikan jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha di Kabupaten Paser pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.4.

Tabel 3.1
Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	15 – 19	13	5	18
2	20 – 29	119	53	172
3	30 – 44	29	10	39
4	45 – 54	5	0	5
5	55	0	0	0
JUMLAH		166	68	234

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 3.2
Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	<= SD	0	0	0
2	SMP / SLTP	0	3	3
3	SMA / SLTA	120	50	170
4	Diploma I	0	0	0
5	Diploma II	1	0	1
6	Diploma III/ Akta III/ Akademi	15	4	19
7	Sarjana (S-1)	29	11	40
8	Pasca Sarjana (S-2)	1	0	1
JUMLAH		166	68	234

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 3.3
Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Jenis Golongan Pokok Jabatan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Jenis Gol. Pokok Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Anggota Angkatan Bersenjata (Kecuali Kepolisian)	0	0	0
2	Anggota Badan Legislatif, Pejabat Tinggi Pemerintah	0	0	0
3	Tenaga Profesional	4	3	7
4	Teknisi dan Kelompok Jabatan yang Sejenis	13	6	19
5	Penata Usaha	35	24	59
6	Tenaga Usaha Jasa dan Penjual Dagangan di Toko dan Pasar	27	17	42
7	Pekerja-pekerja Keterampilan Bidang Pertanian dan Perikanan	0	0	0
8	Pekerja Kasar Terampil dan Sejenisnya	17	1	18
9	Operator dan Perakit mesin dan Mesin Pabrik	32	0	32
10	Pekerja Kasar	40	17	57
JUMLAH		166	68	234

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 3.4
Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Sektor Lapangan Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0	1	0
2	Pertambangan dan Penggalian	43	7	0
3	Industri Pengolahan	0	0	0
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	0	0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan, dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0	0	0
6	Konstruksi	0	0	0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7	11	18
8	Transportasi dan Pergudangan	0	0	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	62	32	94
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4	3	7
12	Real Estat	0	0	0
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0	0	0
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	49	7	56
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0
16	Jasa Pendidikan	0	0	0
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1	7	8
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0	0	0
19	Kegiatan Jasa Lainnya	0	0	0
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	0	0	0
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0
JUMLAH		166	68	234

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah penempatan kerja terdaftar di Kabupaten Paser pada tahun 2021 baik menurut kelompok umur, pendidikan, jenis golongan pokok jabatan dan sektor lapangan usaha sebanyak 234 orang dengan rincian jumlah laki – laki sebanyak 166 orang dan jumlah perempuan sebanyak 68 orang.

Pada penempatan kerja terdaftar menurut kelompok umur didominasi kelompok umur 20 – 29 tahun dengan jumlah sebanyak 172 orang terdiri dari 119 orang laki – laki dan 53 orang perempuan. Menurut pendidikan penempatan kerja terdaftar didominasi dengan tingkat pendidikan SMA/SLTA sebanyak 170 orang yang terdiri dari 120 orang laki – laki dan 50 orang perempuan kemudian menurut jenis golongan pokok jabatan didominasi oleh Penata Usaha sebanyak 140 orang laki – laki dan menurut sektor lapangan usaha didominasi oleh pertambangan dan penggalian sebanyak 0 orang yang terdiri dari 43 orang laki – laki dan 7 orang perempuan.

4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Data dan informasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) khususnya perpanjangan IMTA tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. IMTA diganti dengan Notifikasi, Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Data dibawah ini kami dapatkan dari Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Paser, dapat dilihat pada tabel 4.1 sampai tabel 4.3.

Tabel 4.1
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Negara Asal
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Negara Asal	Jumlah TKA
1	Korea Selatan	21
2	Malaysia	2
3	Sri Lanka	1
JUMLAH		24

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 4.2
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Negara Asal dan Perpanjangan IMTA
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Negara Asal	Jumlah Perpanjangan IMTA
1	Korea Selatan	5
2	Malaysia	2
3	Sri Lanka	1
JUMLAH		8

Sumber Data : Dinas PTSP dan Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 4.3
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Level Jabatan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Level Jabatan	Jumlah TKA
1	Profesional	0
2	Advisor/Consultant	2
3	Manager	13
4	Direksi	9
5	Supervisor	0
6	Teknisi	0
7	Komisaris	0
JUMLAH		24

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 4.4
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Level Jabatan dan Perpanjangan IMTA
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Level Jabatan	Jumlah Perpanjangan IMTA
1	Profesional	0
2	Advisor/Consultant	2
3	Manager	6
4	Direksi	0
5	Supervisor	0
6	Teknisi	0
7	Komisaris	0
JUMLAH		8

Sumber Data : Dinas PTSP dan Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 4.5
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Sektor Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Sektor Usaha	Jumlah TKA
1	Jasa	0
2	Industri	0
3	Pertanian dan Perkebunan	3
4	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian)	21
JUMLAH		24

Sumber Data : Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Tabel 4.6
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Menurut Sektor Usaha dan Perpanjangan IMTA
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Sektor Usaha	Jumlah Perpanjangan IMTA
1	Jasa	0
2	Industri	0
3	Pertanian dan Perkebunan	3
4	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian)	5
JUMLAH		8

Sumber Data : Dinas PTSP dan Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam hal perpanjangan IMTA di Kabupaten Paser pada tahun 2021 baik menurut negara asal, level jabatan, dan sektor usaha sebanyak 24 orang dan keseluruhan tenaga kerja asing (TKA) berasal dari North Korea (korea selatan), Malaysia, Sri Lanka yang mana terbagi menurut level jabatan yakni jabatan Direksi sebanyak 9 orang, jabatan manager sebanyak 13 orang.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Data dan Informasi Ketenagakerjaan

1. Sarana Hubungan Industrial

Data dan informasi sarana hubungan industrial terdiri atas 4 (empat) golongan, meliputi :

- a. Organisasi Pekerja/Buruh;
- b. Organisasi Pengusaha;
- c. LKS Bipartit dan LKS Tripartit;
- d. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

1.1. Organisasi Pekerja/Buruh

Data dan informasi organisasi pekerja/buruh di Kabupaten Paser tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1.1.1
Organisasi Pekerja/Buruh
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Serikat Pekerja/Buruh				Federasi		Konfederasi	
		Unit	Anggota (Orang)			Unit	Anggota (SP/SB)	Unit	Anggota (Federasi)
			L	P	Jumlah				
1	Tahun 2018	3	0	0	0	0	0	0	0
2	Tahun 2019	7	136	1	137	0	0	0	0
3	Januari	1	14	0	15	0	0	0	0
4	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maret	1	15	0	16	0	0	0	0
6	April	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Juli	0	83	0	83	0	0	0	0
10	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Septmber	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
13	November	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		12	248	1	256	0	0	0	0

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Organisasi pekerja/buruh di Kabupaten Paser tahun 2021 terbagi dalam 3 (tiga) sub golongan, meliputi serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi.

Dapat dilihat pada tabel 1.1.1, bahwa jumlah serikat pekerja/buruh sebanyak 12 unit yang terdaftar.

1.2. Organisasi Pengusaha

Data dan informasi anggota organisasi pengusaha di Kabupaten Paser tahun 2021 berjumlah 24 anggota, dimana data ditahun sebelumnya yakni tahun 2017 berjumlah 2 anggota dan tahun 2019 berjumlah 22 anggota Organisasi Pengusaha.

Tabel 1.2.1
Organisasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Anggota
1	TAHUN 2017	2
2	TAHUN 2018	0
3	TAHUN 2019	22
4	Januari	0
5	Februari	0
6	Maret	0
7	April	0
8	Mei	0
9	Juni	0
10	Juli	0
11	Agustus	0
12	September	0
13	Oktober	0
14	November	0
15	Desember	0
Jumlah		24

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

1.3. LKS Bipartit dan LKS Tripartit

Data dan informasi LKS Bipartit dan LKS Tripartit di Kabupaten Paser tahun 2021 berjumlah 20 LKS Bipartit dan 1 LKS Tripartit. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3.1.

Tabel 1.3.1
LKS Bipartit dan LKS Tripartit
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	BIPARTIT	TRIPARTIT
1	TAHUN 2017	5	1
2	TAHUN 2018	4	0
3	TAHUN 2019	4	0
4	Januari	1	0
5	Februari	0	0
6	Maret	0	0
7	April	1	0
8	Mei	0	0
9	Juni	0	0
10	Juli	0	0
11	Agustus	2	0
12	September	1	0
13	Oktober	2	0
14	November	0	0
15	Desember	0	0
Jumlah		20	1

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

1.4. Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Data dan informasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Kabupaten Paser tahun 2021 terdiri dari 2 golongan yakni PP yang disahkan dan PKB yang terdaftar serta memiliki 5 sub golongan yakni baru, pembaruan, perpanjangan, adendum dan lainnya. Data dan informasi peraturan perusahaan yang di syahkan dan peraturan kerja bersama yang terdaftar di Kabupaten Paser tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.1
Peraturan Perusahaan (PP) yang Disyahkan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Baru	Pembaruan	Perpanjangan	Adendum	Lainnya	Jumlah
1	TAHUN 2017	5	2	7	0	0	14
2	TAHUN 2018	0	0	10	1	0	11
3	TAHUN 2019	1	13	2	0	0	16
4	Januari	0	3	0	0	0	3
5	Februari	0	2	0	0	0	2
6	Maret	0	0	0	0	0	0
7	April	0	4	0	0	0	4
8	Mei	0	0	0	0	0	0
9	Juni	0	0	0	1	0	1
10	Juli	0	0	0	0	0	0
11	Agustus	0	0	0	0	0	0
12	September	0	1	0	0	0	1
13	Oktober	0	2	2	0	0	2

14	November	0	3	0	0	0	3
15	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		6	30	19	2	0	57

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dapat dilihat pada tabel 1.4.1, bahwa jumlah PP yang disyahkan di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 57 PP yang mana terdiri dari 6 PP baru, 30 PP pembaruan, 19 PP perpanjangan dan 2 adendum.

Tabel 1.4.2
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Didaftarkan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Baru	Pembaruan	Perpanjangan	Adendum	Lainnya	Jumlah
1	TAHUN 2018	2	0	2	0	0	4
2	Januari	0	0	0	0	0	0
3	Februari	0	0	0	0	0	0
4	Maret	0	1	0	0	0	1
5	April	0	0	0	0	0	0
6	Mei	0	0	0	0	0	0
7	Juni	0	0	0	0	0	0
8	Juli	0	0	0	0	0	0
9	Agustus	0	0	0	0	0	0
10	September	0	0	0	0	0	0
11	Oktober	0	0	0	0	0	0
12	November	0	3	0	0	0	3
13	Desember	0	0	1	0	0	1
Jumlah		2	4	3	0	0	9

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

2. Permasalahan Hubungan Industrial

Data dan informasi permasalahan hubungan industrial terdiri atas 3 (tiga) golongan, meliputi :

- a. Perselisihan hubungan industrial;
- b. Unjuk rasa/mogok;
- c. Pemutusan hubungan kerja;

2.1. Perselisihan Hubungan Industrial

Data dan informasi perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Paser tahun 2021 terdiri dari 2 golongan yakni jenis perselisihan dan penyelesaian. Untuk jenis perselisihan memiliki 4 sub golongan yakni hak, PHK, kepentingan dan SP/SB dalam perusahaan dan penyelesaian memiliki 5 sub golongan yakni bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan HI. Data dan informasi kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Paser tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.1.

Tabel 2.1.1
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Perselisihan (Perkara)					Penyelesaian						Sisa Kasus/Perkara
		Hak	PHK	Kepentingan	SP/SB dalam Perusahaan	Jumlah	Bipartit	Mediasi	Konsiliasi	Arbitrasi	Pengadilan HI	Jumlah	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
3	Maret	2	2	0	0	4	1	4	0	0	0	5	0
4	April	1	1	0	0	2	3	1	0	0	0	4	0
5	Mei	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
6	Juni	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
7	Juli	0	3	0	0	3	2	1	0	0	0	3	0
8	Agustus	0	3	0	0	3	1	2	0	0	0	3	0
9	September	1	1	1	0	3	2	1	0	0	0	3	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
12	Desember	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1
JUMLAH		6	15	1	0	22	10	12	0	0	0	25	1

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dapat dilihat pada tabel 2.1.1, bahwa jumlah kasus perselelisan hubungan industrial di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 22 perkara yang kesemuanya merupakan kasus perselisihan PHK dan HAK dan untuk penyelesaiannya melalui mediasi sebanyak 12 perkara dan tersisa 1 perkara yang belum terselesaikan.

2.2. Unjuk Rasa/Mogok

Data dan informasi unjuk rasa/mogok di Kabupaten Paser tahun 2020 terdiri dari 2 golongan yakni tenaga kerja yang terlibat dan jam kerja yang hilang. Data dan informasi unjuk rasa/mogok tenaga kerja yang terlibat dan jam kerja yang hilang di Kabupaten Paser tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.1, bahwa di tahun 2021 tidak ada data dan informasi unjuk rasa/mogok tenaga kerja yang terlibat dan jam kerja yang hilang dikarenakan tidak adanya unjuk rasa/mogok di kabupaten paser.

Tabel 2.2.1
Unjuk Rasa/Mogok, Tenaga Kerja Yang Terlibat,
Jam Kerja Yang Hilang dan Jenis Tuntutan
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Unjuk Rasa/Mogok (Kasus)	Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)			Jam Kerja Yang Hilang (Jam)
			Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	1	70	0	70	24
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	70	0	70	24

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

2.3. Pemutusan Hubungan Kerja

Data dan informasi pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Paser tahun 2021 terdiri dari 2 golongan yakni jumlah kasus PHK dan sebab PHK. Data dan informasi pemutusan hubungan kerja menurut jumlah kasus PHK dan sebab PHK di Kabupaten Paser tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.3.1.

Tabel 2.3.1
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Tenaga Kerja Yang Ter-PHK (Orang)						Tenaga Kerja Yang Ter-PHK (Orang)		
		Pensiun	PKWT	Outsourcing	Penetapan	Lainnya	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Januari	0	0	0	0	9	9	9	0	9
2	Februari	0	0	0	0	226	226	226	0	226
3	Maret	0	0	0	0	69	69	69	0	69
4	April	2	0	0	0	181	183	183	0	183
5	Mei	2	0	0	0	3	5	5	0	5
6	Juni	0	0	0	0	19	19	19	2	21
7	Juli	0	0	0	0	4	4	4	0	4
8	Agustus	0	0	0	0	26	26	26	0	26
9	September	2	0	0	0	80	82	82	0	82
10	Oktober	0	5	5	0	15	20	20	0	20
11	November	0	0	0	0	1	1	1	0	1
12	Desember	0	0	0	0	5	5	5	0	5
JUMLAH		6	5	0	0	638	649	649	2	651

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa data dan informasi pemutusan hubungan kerja menurut jumlah kasus PHK dan sebab PHK di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 651 kasus terdiri dari 649 laki – laki dan 2 perempuan melalui penetapan tidak ada kasus dan lainnya 638 kasus.

3. Pengupahan

Data dan informasi pengupahan tentang data upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Paser tahun 2020. Pada tahun 2021 UMK Kabupaten Paser sebesar Rp.3.025.172,00 dengan kenaikan 8,51 %

Tabel 3.1
Upah Minimum
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Uraian	Rp.
1	UMK/K	3.050.000,00
2	% Kenaikan UMK/K	0,82

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

4. Fasilitas dan Koperasi Pekerja/Buruh

Data dan informasi fasilitas dan koperasi pekerja/buruh tentang fasilitas kesejahteraan dan koperasi pekerja/buruh. Untuk data dan informasi fasilitas kesejahteraan dan koperasi

pekerja/buruh di Kabupaten Paser tahun 2021 masih belum terdata di karenakan belum tersedianya data, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Fasilitas Kesejahteraan Dan Koperasi Pekerja/Buruh
Di Kabupaten Paser Tahun 2020

No	Bulan	Perusahaan Yg Telah Menetapkan Fasilitas Kesejahteraan	Jenis Fasilitas Kesejahteraan								Koperasi Pekerja Buruh			
			Pelayanan KB	Tempat Penitipan Anak	Perumahan Pekerja/ Buruh	Fasilitas Beribadah	Fasilitas Olahraga	Fasilitas Kantin	Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Rekreasi	Unit	Anggota (Orang)		
												L	P	Jumlah
	Tahun 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Nopember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

5. Pegawai Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Data dan informasi pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdiri dari menurut pendidikan, jabatan dan daftar pegawai. Untuk data dan informasi pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut pendidikan, jabatan dan daftar pegawai di kabupaten paser tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 5.1 sampai 5.3.

Tabel 5.1
Pegawai Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Menurut Pendidikan Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Pendidikan	Jabatan (Orang)				Jumlah
		Mediator	konsiliator	Arbiter	Hakim	
1	S2	2	0	0	0	2
JUMLAH		2	0	0	0	2

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Tabel 5.2
Pegawai Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Mediator	1	1	2
	a. Pertama	0	0	0
	b. Muda	1	1	2
	c. Madya	0	0	0
2	Konsiliator	0	0	0
3	Arbiter	0	0	0
4	Hakim HI	0	0	0
JUMLAH		1	1	2

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Tabel 5.3
Daftar Pegawai Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Nama Pegawai	Jenis Kelamin	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Astikawati Latief, SH, M.H	Perempuan	Tanah Grogot, 12-07-1985	S2	b. Muda
2	H. M. Hafidz Sahid, SP, MS	Laki-Laki	Sungai Tuak, 05-05-1978	S2	b. Muda

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa data dan informasi pegawai teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut pendidikan, jabatan dan daftar pegawai di kabupaten paser tahun 2021 sebanyak 2 orang terdiri dari 1 laki – laki dan 1 perempuan dengan jabatan mediator muda.

6. Hubungan Kerja

Data dan informasi hubungan kerja terdiri atas 2 sub golongan, meliputi : 1). Perusahaan dengan pekerja/buruh berstatus perjanjian kerja waktu tertentu; 2.) Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

6.1. Perusahaan dengan Pekerja/buruh Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Adapun data dan informasi perusahaan dengan pekerja/buruh berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut lapangan usaha di Kabupaten Paser tahun 2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 6.1
Perusahaan Dengan Pekerja/Buruh Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Pekerja PKWT (Orang)			Perusahaan (Unit)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0	0	1770	8
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	351	20
3	Industri Pengolahan	0	0	0	0
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	0	0	0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan, dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0	0	0	0
6	Konstruksi	0	0	0	0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0	0	0	0
8	Transportasi dan Pergudangan	0	0	0	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	0	0	0
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	0	8	1
12	Real Estat	0	0	0	0
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0	0	0	0
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	0	0	0	0
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0
16	Jasa Pendidikan	0	0	0	0
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	0	0	0
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0	0	0	0
19	Kegiatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	0	0	0	0
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	2129	29

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah perusahaan dengan pekerja/buruh berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menurut lapangan usaha di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 29 perusahaan dan pekerja/buruh berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebanyak 2121 orang di lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi dan di lapangan usaha pertambangan dan penggalian .

6.2. Perusahaan dengan Pekerja/buruh Berstatus Outsourcing/ Alih Daya

Adapun data dan informasi perusahaan dengan pekerja/buruh berstatus Outsourcing/ Alih Daya di Kabupaten Paser tahun 2020 dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 6.2
Pekerja / Buruh pada Perusahaan Pemborongan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan (Outsourcing/ Alih Daya) di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Pekerja PKWT (Orang)			Perusahaan (Unit)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0	0	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	4
3	Industri Pengolahan	0	0	0	0
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	0	0	0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan, dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0	0	0	0
6	Konstruksi	0	0	0	0
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0	0	0	0
8	Transportasi dan Pergudangan	0	0	0	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	0	0	0
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0	0	0	0
12	Real Estat	0	0	0	0
13	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	0	0	0	0
14	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	0	0	0	0
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0	0	0	0
16	Jasa Pendidikan	0	0	0	0
17	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0	0	0	0
18	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0	0	0	0
19	Kegiatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
20	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	0	0	0	0
21	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	4

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa jumlah perusahaan dengan pekerja/buruh berstatus Outsourcing/ Alih Daya di Kabupaten Paser tahun 2021 sebanyak 4 perusahaan 6.3

6.3. Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja

Adapun data dan informasi perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di Kabupaten Paser tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 6.3
Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
Di Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Bulan	Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja (Unit)
1	Januari	1
2	Februari	5
3	Maret	3
4	April	4
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	1
10	Oktober	0
11	November	1
12	Desember	0
JUMLAH		16

Sumber data dari Bidang Hubungan Industrial

BAB VII P E N U T U P

Buku Data dan Informasi Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2021 merupakan wujud dari pengembangan sistem media informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang secara umum menggambarkan sebagian data termasuk didalamnya capaian pelaksanaan pembangunan (penyelenggaraan pemerintahan) bidang Ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2017 - 2021 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang kemudian dapat bersinergi dalam upaya menekan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat terwujud dan merupakan dasar acuan rencana pembangunan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan yang berbasis pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, perencanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan Jamsostek.

Buku ini dirancang untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rencana tenaga kerja ini dapat direvisi secara berkala untuk menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dan program yang ada serta perkembangan baru, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Akhirnya, keberhasilan melaksanakan rencana tenaga kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen, integritas dan dedikasi seluruh *stakeholders* (pihak terkait), sehingga tujuan pembangunan ketenagakerjaannya itu untuk pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil maupun spiritual dapat terwujud.